



Pensertifikatan Aset Ganjalan

PONTIANAK—Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya menjawab pertanyaan fraksi-fraksi di DPRD Kalbar terkait status opini Wajar, Tanpa Pengucualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan tahun anggaran 2013. "Sebelumnya sudah dijawab kemarin oleh BPK RI. WTP Dengan Paragraf Penjelasan ke fraksi-fraksi di DPRD Kalbar," ungkapnya Rabu (27/8) di Pontianak. Menurut dia WTP Dengan Paragraf Penjelasan dari LHP

Kuangan tahun anggaran 2013 sebetulnya sama persis dengan WTP tahun sebelumnya. BPK RI juga memberikan LHP tahun anggaran sebelumnya yakni opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan. Hanya dengan ketersediaan informasi menurut BPK RI masih dianggap wajar sehingga Pemprov Kalbar masih layak memperoleh status WTP.

Dia menambahkan catatan status WTP Dengan Paragraf Penjelasan serah Pemprov Kalbar adalah bagaimana mengupayakan pencatatan aset. Pemprov juga berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perbaikan. Dari segi catatan aset-asetnya tercatat lengkap. "Bahkan, Pemprov sampai membuat tim. Sekda sampai mengularkan surat untuk pensertifikatan aset-aset di Pemprov Kalbar," ujarnya.

Upaya tersebut dilihat oleh BPK RI adanya keseriusan soal pendataan aset-aset yang ada. Aset Pemprov jumlahnya tersebar dan banyak. Sehingga membutuhkan waktu dalam bentuk pendataan secara akurat, akuntabel dan transparan. "Justru kita berharap jangan hanya karena soal aset kita tidak memperoleh WTP. Padahal dari segi laporan penyajian laporan terdapat apa adanya," kata Christiandy. Sebelumnya Fraksi-Fraksi di DPRD Kalbar memberikan apresiasi tinggi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan tahun anggaran 2013 dengan status opini Wajar Tanpa Pengucualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Meski begitu, fraksi-fraksi tetap mempertanyakan ke Badan Pemeriksa Keuangan RI yang membetulkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI yang membetulkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan. "Itu berarti belum murni 100 persen WTP. Dalam hal ini terkait soal aset yang belum terselesaikan," ujar Miftah.

Dari fraksi PAN yang diketuai Ikhwani A. Rahim dan Sy. Izhar Assyuri juga memberikan penjelasan dalam hal

menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PPP DPRD Provinsi Kalbar terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalbar tahun 2013. Senin kemarin di Pontianak.

Katanya merujuk pada UU nomor 15 tahun 2014 ada empat opini yang biasanya diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Diantaranya WTP (Wajar Tanpa Pengucualian), WDP (Wajar Dengan Pengucualian), TW (Tidak Wajar), dan TMP (Tidak Membertanggungjawabkan). "Ini berarti WTP di sana BPK memberikan penjelasan dalam hal

tanyakan kalimat dan maksud BPK RI memberikan status WTP Dengan Paragraf Penjelasan. "Apakah ini masuk dalam WTP minus atau ada penjelasan lain," ungkap dia. Fraksi PAN juga menyayangkan ternyata masalah aset masih menjadi hambatan atau masalah dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI Kalbar. "Tentunya juga membuat kami bertanya apakah Pemprov kurang serius mengelola dan mendata aset daerah. Makanya kita minta manajemen pengelolaan aset perlu terus diperbaiki dengan melakukan langkah kongkrit," katanya. (den)